

RAPAT KERJA
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR, 7-8 MEI 1991

RLPM - XIII

**PERANAN IPB DALAM PEMBANGUNAN/
PENGEMBANGAN WILAYAH**

Oleh:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DATI I JAWA BARAT



LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1991

**PERANAN IPB DALAM PEMBANGUNAN/
PENGEMBANGAN WILAYAH ¹⁾**

Oleh:

ARIFIN YOESOEFF ²⁾

I. PENDAHULUAN

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah, sedang keseluruhan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan pembangunan Nasional.

Dengan demikian, mengisyaratkan keharusan adanya keselarasan antara pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah diperkuat oleh adanya kebijaksanaan bahwa sistem dan pendekatan pembangunan sektoral maupun pembangunan daerah memiliki derajat nilai yang sama pentingnya.

Kebijaksanaan tersebut perlu ditempuh disebabkan oleh adanya kenyataan obyektif selama Pelita I, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang terlampau bertumpu pada sistem pendekatan sektoral telah mengakibatkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam pertumbuhan dan kemakmuran antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, karena kurangnya sinkronisasi antara program-program sektoral yang dilaksanakan di setiap daerah dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Akibat adanya kepincangan pertumbuhan pada sejumlah daerah, baik dalam lingkup Nasional maupun dalam lingkup Regional (wilayah) akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi ketahanan Nasional, karena kurang dapat terlaksananya Trilogi Pembangunan sebagaimana yang diinginkan. Maka sejak Pelita II di Propinsi Dati I Jawa Barat dilaksanakan sistem pendekatan perwilayahan; disamping terus dilaksanakannya kegiatan pembangunan berdasarkan sistem dan pendekatan sektoral.

Berdasarkan sistem dan pendekatan perwilayahan dimaksud, Jawa Barat dibagi menjadi 7 (tujuh) Wilayah Pembangunan (WP), yang perinciannya sebagaimana uraian berikut ini.

-
- 1) Disampaikan dalam Rapat Kerja Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, tanggal 7-8 Mei 1991.
 - 2) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat.

II. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN

Kebijaksanaan tata ruang pada tiap Wilayah Pembangunan ditujukan dalam rangka pencapaian sedikitnya empat hal:

Pertama, perkembangan ekonomi yang seimbang pada setiap Wilayah Pembangunan.

Kedua, perbaikan kualitas kehidupan dengan cara menanggulangi masalah-masalah pokok yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Ketiga, pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara optimal.

Keempat, penggunaan tanah yang proporsional dan rasional yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan pokok dari setiap kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas sejak Pelita II Wilayah Jawa Barat telah dibagi menjadi 7 (tujuh) Wilayah Pembangunan yang sampai saat ini masih relevan untuk tetap dijadikan pegangan dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian kebijaksanaan tata ruang pada setiap Wilayah Pembangunan memuat arahan-arahan fungsi, penggunaan lahan secara garis besar, struktur dan hirarki perkotaan dan faktor-faktor pendukungnya.

Wilayah Pembangunan (WP) tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Wilayah Pembangunan Banten terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak*

Wilayah Pembangunan ini diharapkan untuk berfungsi menjadi kawasan industri, pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan pariwisata serta pengembangan pertanian dan pemanfaatan lahan kering.

2. *Wilayah Pembangunan Botabek terdiri dari kabupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi*

Wilayah Pembangunan ini diarahkan untuk berfungsi sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta, yang harus dapat menampung kegiatan-kegiatan yang sudah dirasakan jenuh oleh DKI, kemudian juga sebagai perlindungan terhadap kegiatan yang akan merusak lingkungan baik kegiatan yang berada di Wilayah DKI serta sebagai pusat pengembangan pertanian, khususnya sayuran, buah-buahan dan tanaman hias.

3. *Wilayah Pembangunan Sukabumi terdiri dari Kabupaten Sukabumi dan Kotamadya Sukabumi*

Wilayah Pembangunan ini diarahkan agar dapat berfungsi menjadi pengembangan Wilayah Botabek, sebagai wilayah pengembangan pariwisata dan pengembangan pertanian.

4. *Wilayah Pembangunan Purwasuka terdiri dari Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang*

Wilayah Pembangunan ini diarahkan untuk dapat berfungsi sebagai lumbung padi Jawa Barat, pengembangan usaha perkebunan dan perikanan serta pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat.

5. *Wilayah Pembangunan Bandung Raya terdiri dari Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, Cianjur dan Kotawadya Bandung*

Wilayah Pembangunan ini terdiri dari wilayah inti dan wilayah pengaruh. Wilayah inti meliputi Kotamadya Bandung, Kabupaten Bandung. Wilayah pengaruh meliputi Kabupaten Garut, Cianjur dan Sumedang.

6. *Wilayah Pembangunan Cirebon terdiri dari Kabupaten Cirebon, Indrawayu, Kuningan, Majalengka dan Kotawadya Cirebon*

Wilayah Pembangunan ini diarahkan untuk dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap perkembangan kota Jakarta, jalur transportasi utama dengan Jawa Tengah, pusat industri dan perdagangan serta sebagai pengembangan pertanian.

7. *Wilayah Pembangunan Priatin terdiri dari Kabupaten Tasikmalaya dan Ciawis*

Wilayah Pembangunan ini diarahkan untuk dapat berfungsi sebagai daerah pengembangan pertanian lahan kering, industri kerajinan, perkebunan, pariwisata dan pertanian lahan basah.

III. PERANAN IPB DALAM MENGENAL WILAYAH PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT

Tugas pokok Perguruan Tinggi adalah melaksanakan Tridarma yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan tugas Perguruan Tinggi tidak semata-mata diukur dari banyaknya lulusan yang dilaksanakan atau banyaknya penelitian yang dipublikasikan, akan tetapi dilihat pula dari kemampuan untuk mengupayakan para lulusannya untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi, berwatak dan memiliki ketinggian moral serta cinta kepada kemanusiaan dan masyarakat tempat mereka dilahirkan dan mengabdikan. Dengan kata lain setiap perguruan tinggi harus mampu menciptakan lulusannya sebagai insan-insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kecerdasan dan keterampilan, mempunyai budi pekerti yang tinggi, kuat kepribadiannya, tebal semangat kebangsaannya serta cinta tanah air.

Salah satu upaya menciptakan lulusan yang demikian, maka sebelum mereka menamatkan pendidikannya perlu mengalami pendidikan dan proses belajar dengan cara mencoba menanggulangi berbagai permasalahan pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

Berbicara mengenai peranan IPB dalam upaya mengisi wilayah pembangunan di Jawa Barat, maka tidak boleh terlepas dari disiplin ilmu yang dikembangkan pada perguruan tinggi yang bersangkutan, yaitu masalah yang berkaitan dengan seluk beluk pertanian.

Beranjak dari kegiatan perwilayahan pembangunan, berdasarkan sistem dan perwilayahan pembangunan, dalam uraian dimuka telah dijelaskan bahwa Jawa Barat dibagi menjadi 7 (tujuh) Wilayah Pembangunan, tiap-tiap Wilayah Pembangunan sudah ditetapkan fungsi-fungsi utamanya, baik sebagai daerah pertanian, industri, pariwisata dan lain-lain.

Oleh karena itu, peranan IPB dalam mengisi wilayah pembangunan dimaksud, kiranya bisa menganalisa dan mendalami masalah-masalah yang terjadi pada masing-masing Wilayah Pembangunan beserta fungsi-fungsi utamanya dikaitkan dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di IPB yaitu masalah pertanian.

Langkah-langkah operasional yang perlu dilakukan dalam kaitannya dengan peranan IPB dalam mengisi wilayah pembangunan di Jawa Barat, harus beranjak dari Tridarma dengan melihat wilayah pembangunan beserta fungsi-fungsi utamanya, yaitu:

1. Dalam kaitannya dengan penelitian maka IPB diharapkan dapat berperan untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan kajian ilmiah dalam upaya memperkuat dan mempercepat daerah-daerah yang telah ditetapkan untuk berfungsi sebagai daerah pertanian;
2. Dalam kaitan dengan pengabdian pada masyarakat yang antara lain dijabarkan dalam bentuk KKN (Kuliah Kerja Nyata), maka lokasi/daerah serta program yang disusun kiranya dapat berorientasi kepada masalah-masalah yang dihadapi serta fungsi yang telah ditetapkan pada masing-masing wilayah pembangunan;

Sebagaimana dimaklumi bahwa KKN adalah suatu kegiatan belajar-mengajar dengan melalui penerjunan mahasiswa untuk bekerja dan hidup ditengah-tengah masyarakat, serta bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan dan memecahkan masalah-masalah pembangunan yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, maka KKN yang akan dilakukan oleh mahasiswa IPB Jawa Barat, kiranya bisa membantu mempercepat pembangunan di pedesaan, sehingga KKN tersebut baik langsung maupun tidak langsung dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam upaya mengisi fungsi-fungsi wilayah pembangunan sesuai dengan Pola Dasar dan Repelita V Jawa Barat.

IV. PENUTUP

Demikian pokok-pokok pikiran yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam rangka merumuskan beberapa program dan strategi dasar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB.

Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkahi usaha kita bersama, dalam rangka pembangunan di Jawa Barat, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional.